



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

syukriyabdullah@unsyiah.ac.id

DOI: 10.22219/jrak.v12i2.21502

Citation:

Handayani., Darwanis., & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akruwal Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 275-291.

Article Process

Submitted:

July 6, 2022

Reviewed:

July 31, 2022

Revised:

August 1, 2022

Accepted:

August 27, 2022

Published:

August 31, 2022

Office:

Department of Accounting
University of Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

INTRODUCTION

Article Type: Research Paper

**DETERMINAN MANIPULASI
AKRUAL DALAM PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Handayani¹, Darwanis²,
Syukriy Abdullah^{3*}**

Affiliation:

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the effects of government size, fiscal capacity, fiscal distress, and legislature size on accrual manipulation in local government financial reporting. The study was conducted on 23 local governments in Aceh with data analysis using multiple linear regressions. The data is extracted from audited financial reports of the local governments for the period 2016-2020. This study uses the Modified Jones Model to measure the manipulation of accruals. The results show that the government size and fiscal distress have a negative effect on accrual manipulation, legislature size has a positive effect on accrual manipulation, and fiscal capacity have no effect on accrual manipulation. These results indicate that the accrual manipulation in financial reporting can occur due to discretionary policies carried out by local government officials with the aim of making their financial performance look good.

KEYWORDS: Accrual Manipulation; Fiscal Capacity; Fiscal Distress; Legislature Size; Local Government.

Reformasi pemerintahan daerah di Indonesia dengan menerapkan desentralisasi fiskal seiring dengan konsep *New Public Management* (NPM), mendorong penggunaan prinsip-prinsip bisnis pada organisasi pemerintahan, termasuk akuntansi berbasis akrual (Vinnari & Nasi, 2008). Implementasi akrual secara penuh sejak pelaporan keuangan tahun 2015 membuka peluang terjadinya manajemen akrual pada pemerintah daerah (Pemda), yang berimplikasi pada bias informasi dan masalah lainnya (Afiqoh, 2020; Lapsley, et al., 2009).

Tujuan utama pelaporan keuangan berbasis akrual adalah memberikan informasi tentang posisi dan kondisi keuangan (Rivenbark & Roenigk, 2011), serta kinerja keuangan (Schipper, 1989; Jansen, 2008). Kebijakan dan sistem akuntansi ini diatur dalam peraturan kepala daerah, yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menentukan besaran angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), terutama pada Neraca dan Laporan Operasional (LO). Fleksibilitas diskresi ini berimplikasi pada perdebatan arti penting implementasi akuntansi berbasis akrual (Carlin, 2005; Arnaboldi & Lapsley, 2009).

Salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan LKPD adalah legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPD sebagai media akuntabilitas untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),¹ digunakan oleh DPRD sebagai media untuk menilai kinerja anggaran dan keuangan Pemda, setelah sebelumnya diaudit oleh auditor independen (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia/BPK RI). Pendelegasian pelaksanaan APBD oleh DPRD kepada eksekutif/pemerintah daerah adalah makna dari persetujuan DPRD atas penetapan peraturan daerah (Perda) tentang APBD² oleh kepala daerah sebelum tahun pelaporan berkenaan mulai berjalan. Perda APBD adalah “kontrak” antara eksekutif (Pemda) dengan legislatif (DPRD), yang menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja Pemda (Steccolini, 2004; Halim & Abdullah, 2006; Abdullah, 2012).

Perspektif keagenan menyatakan bahwa penyusun laporan keuangan cenderung melakukan diskresi akrual untuk memanipulasi informasi yang disajikan agar sejalan *self-interest*-nya, misalnya untuk pencitraan, mendapatkan bonus atau penghargaan, dan menyembunyikan fakta (Vinnari & Näsi, 2008; Pilcher, 2011; Hafizah, et al., 2017; Bisogno & Donatella, 2021). Adanya kewenangan penyusun laporan keuangan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan oleh standar (Abdullah & Junita, 2020) berimplikasi pada terjadinya praktik *earnings management* dan *creative accounting* (Pina, et al., 2012; Beck, 2018; Cohen, et al., 2019), terutama melalui akrual diskresioner (Ferreira, et al., 2020). Diskresi ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh *users*, termasuk anggota DPRD. DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (Abdullah, et al., 2020) dapat mengambil keputusan yang keliru sebagai akibat dari manipulasi informasi dalam LKPD tersebut, terlebih lagi mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menganalisis penyebab dan dampak dari manipulasi itu (Abdullah, et al., 2020).

Diskresi terhadap akrual dalam pelaporan keuangan Pemda dapat dipengaruhi oleh faktor oportunistik manajemen, yang cenderung “menyamarkan” ketidakpatuhan terhadap kebijakan akuntansi dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi *stakeholders* dan alasan efisiensi (Pilcher, 2011), sebagai akibat adanya asimetri informasi antara Pemda dengan pengguna LKPD. Perbedaan tingkatan akrual antar Pemda dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam kebijakan akuntansi pada masing-masing daerah (Rohman, 2016; Rohman, et al., 2019). Perbedaan ini berimplikasi pada penyajian komponen LKPD dan akun-akun di

¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

² Di provinsi Aceh, sebutan untuk Perda adalah qanun, baik di Pemerintah Aceh, maupun di pemerintah kabupaten dan kota.

dalamnya, sehingga menurunkan tingkat keterbandingan (*comparability*) LKPD tersebut (Abdullah & Junita, 2020; Abdullah, et al., 2020).

277 Manipulasi akrual juga digunakan oleh Pemda untuk melakukan penyesuaian kinerja finansial terkait dengan persaingan politik (Donatella, 2019) dan karakteristik birokrat pengelola keuangan (Donatella & Tagesson, 2020). Donatella (2019) memberi bukti empiris tentang subjektivitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual yang dapat bermasalah karena memberi kesempatan kepada politisi terpilih (*elected politicians*) untuk memanipulasi informasi yang disampaikan kepada *voters* dan *stakeholder* lain. Oleh karena itu, dalam rangka meyakini bahwa sistem akuntansi berbasis akrual memberikan informasi yang *reliable* dan lengkap, aturan dan regulasi harus dibuat sedemikian rupa oleh *standard setters* (Abdullah, et al., 2020) dan kualitas audit perlu ditingkatkan (Chi, et al., 2011). Asimetri informasi dapat berkurang dengan cara memberikan sinyal kepada masyarakat melalui penyajian informasi yang berkualitas dalam LKPD (Connelly et al., 2011), peningkatan sistem pengendalian intern dan pengungkapan yang lebih lengkap (Sopamena, et al., 2020), serta audit eksternal (Donatella, et al., 2019; Ansori, et al., 2021).

Studi tentang *earnings management* pada pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa negara, seperti Pilcher (2011) di Australia, Vinnari & Nasi (2008) di Finlandia, Pina, et al. (2012) dan Arcas & Marti (2016) di Inggris, Beck (2018) di Amerika Serikat, Cohen, et al. (2019) di Italia dan Yunani, Annesi-Pessina & Sicilia (2020) di Italia, Donatella (2019) dan Donatella & Tagesson (2020) di Swedia, dan Ferreira, et al. (2020) di Portugal. Namun, kajian tentang manajemen akrual pada Pemda masih jarang untuk kasus di Indonesia (beberapa diantaranya adalah Rohman, 2016; Rohman, et al., 2018 dan 2019; Gamayuni, et al., 2019; Ram'dhan, et al., 2021). Selain itu, belum ada studi yang mengkaitkan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan dengan aspek pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan oleh anggota lembaga perwakilan (*legislature*), yang memiliki kepentingan politik sekaligus sebagai perpanjangan tangan publik di pemerintahan daerah.

Analisis awal terhadap data yang bersumber dari LKPD kabupaten dan kota di Aceh periode 2016-2020, dengan menggunakan model *modified-Jones* dalam pengukuran akrual diskresioner, ditemukan adanya perbedaan besaran nilai akrual diskresioner (*discretionary accrual*). Nilai akrual diskresioner terendah pada tahun 2020, ada di Kota Banda Aceh (0,17), Kab. Aceh Barat (0,25) dan Kab. Aceh Jaya (0,27), sedangkan Pemda nilai tertinggi ada pada Kab. Bener Meriah, Kab. Simeulue dan Kab. Aceh Singkil, masing-masing sebesar 0,40, 0,42, dan 0,42. Besaran nilai diskresi akrual ini mencerminkan jenjang penerapan akrual yang dilakukan oleh Pemda atas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Hal ini menggambarkan perbedaan tingkatan akrual antar-Pemda (Rohman, et al., 2019).

Studi ini menganalisis 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi manipulasi akrual di Pemda, yang berada di luar kendali Pemda sendiri. Keempat variabel tersebut adalah ukuran Pemda (*government size*), kapasitas fiskal (*fiscal capacity*), tekanan fiskal (*fiscal distress*), dan ukuran legislatif (*legislature size*). Pengujian semua prediktor ini dalam sebuah model prediksi belum pernah dilakukan sebelumnya untuk Pemda di Indonesia.

Ukuran Pemda merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyajian informasi, di mana Pemda yang lebih besar memiliki kompleksitas permasalahan yang lebih tinggi, mekanisme kebijakan publik lebih dinamis, dan mendapat perhatian (*attention*) dari pemerintah atasan dan tuntutan dari publik yang lebih besar. Pemda yang lebih besar akan cenderung lebih berhati-hati dan cermat dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam penganggaran dan pelaporannya (*accountability side*). Kecermatan ini didukung dengan teknologi informasi paling baik dan tenaga profesional yang dapat diberi kompensasi besar dari sumberdaya yang dimiliki Pemda. Oleh karena itu, akrual diskresioner akan lebih kecil

pada Pemda yang lebih besar (Herdiningsih, et al., 2019; Purnama, 2017). Namun, menurut Blom-Hansen, et al. (2021), persoalan *jurisdiction size* tidak perlu dipermasalahkan.

Ukuran Pemda menggambarkan seberapa besar beban tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ukuran Pemda dapat diprosikan dari jumlah penduduk, pegawai, unit organisasi, total pendapatan dan belanja dalam APBD, tingkat produktivitas, dan *total asset* (Damanpour, 1991; Abdullah, et al., 2019; Sari & Mustanda, 2019). Daerah yang memiliki jumlah aset dan pegawai yang lebih besar memiliki kapasitas dan beban yang juga lebih besar, sehingga memiliki implikasi terhadap kinerja keuangannya (Sari, 2016; Abdullah, et al., 2019; Sari & Mustanda, 2019).

Analisis tentang pengaruh ukuran (*size*) organisasi, baik privat maupun publik, telah banyak dilakukan, terutama yang terkait dengan prospek dan kinerja, serta kepentingan *stakeholders*. Makna *size* dalam penelitian bisnis dan manajemen sangat penting, terutama dalam hal kemampuan finansial yang diukur dengan *firm size*, yang dapat dikaitkan dengan profitabilitas dan manajemen laba (Siregar & Utama, 2008; Kalbuana, et al., 2021). Menurut Handayani & Rachadi (2009), perusahaan cenderung melaporkan laba positif (menghindari pelaporan kerugian), sehingga merekayasa informasi terkait laba, namun, ketersediaan informasi perusahaan besar lebih banyak dan luas di pasar daripada perusahaan kecil (Siregar & Utama, 2008).

Fenomena manipulasi akrual dalam kaitannya dengan ukuran organisasi atau perusahaan penyusun laporan keuangan telah berkembang di sektor bisnis, seperti Dechow (1995), Handayani & Rachadi (2009), dan Rohman, et al. (2018). Menurut Richardson (2000) dan Purnama (2017), perusahaan besar cenderung tidak merekayasa labanya, berbeda dengan perusahaan kecil. Pada pemerintahan, Sari (2016) dan Sari & Mustanda (2019) menemukan bahwa besaran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji tentang pengaruh GS terhadap manipulasi akrual dinyatakan seperti berikut:

H₁: Government size berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan dari Pemda untuk memperoleh pendapatan dalam rangka membiayai keperluan pelayanan publiknya (Martinez-Vazquez & Boex, 1997; Nagowski 2007). Kekuatan suatu negara adalah kapasitas fiskalnya, yakni terkait dengan jumlah dan jenis sumber daya yang dimilikinya (Baskaran & Bigsten, 2013). Menurut Baskaran & Bigsten (2013), konsep kapasitas fiskal mengacu pada kemampuan ekstraktif negara, yaitu bagaimana potensi sumber daya negara bisa diekstrak secara "efisien", sehingga terbangun suatu pemerintahan yang efisien dan mendorong demokrasi dan menurunkan korupsi. Lewis (2003) berpandangan bahwa kapasitas fiskal daerah dapat diukur dengan 'surplus operasi', yakni kemampuan daerah dalam membayar pinjamannya. Surplus operasi merupakan jumlah penerimaan dari dana bagi hasil dan PAD dikurangi belanja wajib daerah, yang bermakna bahwa kapasitas fiskal tidak lepas dari transfer dari Pusat. Transfer dari Pusat dimaksudkan untuk pemerataan kapasitas fiskal antar-daerah dan meningkatkan kemampuan Pemda untuk memenuhi standar pelayanan tanpa membebani masyarakat sendiri. Oleh karena itu, Pemda akan berupaya untuk melakukan restrukturisasi kapasitas fiskalnya untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Surya, 2016).

Kapasitas fiskal yang rendah mencerminkan kemampuan keuangan yang terbatas untuk memberikan pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang melebihi standar minimal. Keterbatasan kemampuan ini berimplikasi pada rumitnya diskusi dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil

terbaik. Kedua belah pihak akan lebih cermat dalam menganalisis setiap rencana yang akan dibiayai dengan belanja daerah. Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung ingin melaporkannya kinerja keuangan yang lebih baik melalui perencanaan akrual diskresioner yang lebih besar, yang dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif (Halim & Abdullah, 2006). Hipotesis yang diuji tentang pengaruh KF terhadap manipulasi akrual dinyatakan seperti berikut:

H₂: *Kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.*

Fiscal distress merupakan ketidakmampuan Pemda untuk mengurangi defisit atau menaikkan surplus anggaran (Zeedan et al., 2014). Menurut Maher, et al. (2020), definisi *fiscal distress* masih dalam perdebatan mengingat kompleksitas dalam terma ini. Anggaran yang menggunakan basis kas dipertanggungjawabkan dalam LKPD yang menggunakan basis akrual, sehingga Pemda akan berupaya untuk meminimalkan terjadinya *fiscal distress* dalam pelaporannya. *Fiscal distress* adalah penurunan sumber daya yang signifikan, yang sebagian tergambar dari kenaikan rasio pendapatan transfer yang lebih banyak terhadap total pendapatan, rasio belanja administratif yang semakin besar terhadap total pengeluaran, utang yang semakin banyak, dan mengalami pertumbuhan pendapatan yang kecil (Trussel & Patrick, 2009).

Studi tentang pengaruh *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda masih sangat jarang. Namun di sektor privat, penelitian tentang asosiasi kesulitan keuangan dengan *earnings management* telah banyak dilakukan. Riandiani & Wahyuddin (2015) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Studi yang dilakukan oleh Nugroho & Firmansyah (2017) menemukan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan manajemen laba riil melalui pemanipulasian nilai penjualan untuk memperbesar nilai laba akuntansi dan menekan nilai beban pajak. Pengaruh *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual dalam LKPD dapat dilihat dari selisih surplus/defisit laporan operasional (LO) dan laporan arus kas (LRA) (Abdullah & Junita, 2020). Hipotesis yang diuji terkait dengan pengaruh *fiscal distress* terhadap manipulasi akrual dinyatakan sebagai berikut:

H₃: *Fiscal distress berpengaruh terhadap manipulasi akrual.*

Ukuran legislatif (*legislature size*) berhubungan dengan penggunaan informasi yang tersaji dalam LKPD untuk pengambilan keputusan penting di pemerintahan daerah, terutama dalam hal menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran selama tahun berjalan (Junita, et al., 2018). Secara matematis, jumlah anggota legislatif sejalan dengan jumlah populasi, sehingga semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen (populasi) yang harus diperjuangkan. Akibatnya, semakin besar kemungkinan terjadinya alokasi dan kebijakan perubahan APBD di tahun berjalan (Junita, et al., 2018). Menurut Ricciuti (2004) ukuran legislatif memiliki efek yang tidak terbatas karena adanya praktik balas jasa kepada pemilih (*voters*). Legislatif (DPRD) sebagai *principal* membutuhkan informasi terutama untuk pertanggungjawaban kinerja dan keuangan (Junita dan Abdullah, 2016), yang tersaji dalam LKPD LKPD merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang telah diaudit oleh BPK RI.

Hasil penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, sementara Petterson-Lidbom (2012) menemukan bahwa semakin besar ukuran legislatif, maka kontrol terhadap perilaku birokrat yang *budget maximizing* akan lebih baik. Namun, bias informasi karena penggunaan basis akrual dalam penyusunan LKPD, terutama karena adanya akrual diskresioner (Ferreira, et al., 2020), tidak sepenuhnya dipahami implikasinya oleh anggota DPRD (legislatif). Legislatif memiliki fungsi pengawasan (*oversight*), yang jika berfungsi dengan baik dapat mencegah praktik korupsi

(Stapenhurst, et al., 2018) dan dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemda (Abdullah, et al., 2020). Hipotesis yang diuji terkait dengan pengaruh *legislature size* terhadap manipulasi akrual adalah:

H4: *Legislature size berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.*

METHOD

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemda kabupaten/kota di Indonesia, yang sampai dengan 31 Desember 2020 seluruhnya ada sebanyak 508. Pemda yang dijadikan sampel secara *purposive* adalah Pemda kabupaten/kota di Aceh yang berjumlah 23 Pemda, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Keunikan sampel ini adalah berstatus otonomi khusus dan menerapkan Syariat Islam, yang berimplikasi pada penerimaan transfer dari Pusat berupa dana otonomi khusus (Otsus) dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (TDBH Migas), serta dibentuknya banyak organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang tidak ada di provinsi lain. Selain itu, memiliki kelengkapan data LKPD tahun 2016-2020. LKPD yang digunakan adalah Neraca untuk mendapatkan data total aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan data Pendapatan-LRA, Laporan Operasional (LO) untuk mendapatkan data Pendapatan-LO, dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk mendapatkan data Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan kabupaten dan kota di Aceh yang telah diaudit dan dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh dan data jumlah anggota DPRD dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah amatan ada sebanyak 115, yakni 23 Pemda kabupaten dan kota untuk 5 tahun, sedangkan untuk jumlah anggota DPRD diperoleh dari Keputusan KPU Nomor: 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Variabel penelitian yang digunakan adalah satu variabel terikat (*dependent variable*), yakni Manipulasi Akrua, dan tiga variabel bebas (*independent variables*), yakni *government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size*. Manipulasi akrual diartikan sebagai rekayasa akrual yang dilakukan oleh penyusun LKPD untuk melaporkan hasil yang diinginkan, yang berbeda dari yang sebenarnya (Ferreira, et al., 2020), yang dapat terjadi ketika Pemda menerapkan basis akuntansi akrual dalam pelaporan keuangannya (Pilcher, 2011; Cohen, et al., 2019). Pengukuran manipulasi akrual menggunakan persamaan yang telah digunakan oleh Sugiri & Abdullah (2003), Dechow (2005), Rohman, et al. (2018), Cohen, et al. (2019), yaitu *Modified Jones Model*. Persamaan-persamaan tersebut akan menghasilkan angka akrual diskresioner (*discretionary accruals*). Proses penurunan persamaan dimaksud adalah sebagai berikut:

$$TACC_{i,n} = EXBI_{i,n} - CFO_{i,n}$$

dimana: $TACC_{i,n}$ adalah total akrual Pemda i pada tahun n ; $EXBI_{i,n}$ adalah pendapatan sebelum pos luar biasa (surplus/defisit) Pemda i pada tahun n ; dan $CFO_{i,n}$ = Arus kas bersih dari aktifitas operasi Pemda i pada tahun n .

Perhitungan *total accrual (TA)* diestimasi dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* berikut:

$$TACC_{i,n}/TA_{i,n}-1=\alpha_0(1/TA_{i,n-1})+\alpha_1(\Delta Rev_{i,n}/TA_{i,n-1})+\alpha_2(PPE_{i,n}/TA_{i,n-1})+\varepsilon_{i,n}$$

dimana: $TACC_{i,n}$ adalah total akrual pemerintah daerah i pada tahun n ; $\Delta Rev_{i,n}$ adalah Pendapatan Pemda i pada tahun n dikurangi dengan pendapatan Pemda i pada tahun $n-1$; $PPE_{i,n}$ adalah aset tetap kotor Pemda i pada tahun n ; $TA_{i,n}$ adalah total aset Pemda i pada tahun n ; dan $\varepsilon_{i,n}$ adalah *error terms*.

Koefisien regresi pada persamaan (2), menghasilkan *non-discretionary accruals (NDA)* yang ditentukan dengan formula sebagai berikut (Cohen, *et al.*, 2019):

$$NDA_{i,n} = \beta_0 + \beta_1 (\Delta Rev_{i,n} / TA_{i,n} - 1) + \beta_2 (PPE_{i,n} / TA_{i,n} - 1)$$

dimana: $NDA_{i,n}$ adalah estimasi nondiskresi akrual Pemda i ; $\Delta Rev_{i,n-1}$ adalah pendapatan Pemda i pada tahun $n-1$; $PPE_{i,n}$ adalah aset tetap kotor Pemda i pada tahun n ; dan $TA_{i,n}$ adalah total aset Pemda i pada tahun $n-1$.

Nilai *discretionary accruals (DA)* sebagai ukuran manipulasi akrual ditentukan dengan formula berikut:

$$DA_{i,n} = (TACC_{i,n}/TA_{i,n}) - NDA_{i,n}$$

dimana: $DA_{i,n}$ adalah total diskresi akrual Pemda i ; $TACC_{i,n}$ adalah total akrual Pemda i pada tahun n ; $TA_{i,n-1}$ adalah total aset Pemda i pada tahun $n-1$; dan $NDA_{i,n}$ adalah estimasi non diskresi akrual Pemda i pada tahun n .

Government Size (GS) merupakan ukuran dari suatu Pemda yang menggambarkan beban pelayanan publik, lingkup pelayanan publik, besaran anggaran, dan besaran kekayaan yang dimiliki. Variabel ini diukur dengan jumlah aset yang tersaji dalam neraca per tanggal 31 Desember.

Kapasitas Fiskal (KF) mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban belanjanya. Variabel ini diukur dengan angka selisih antara total pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk belanja tertentu.

Fiscal Distress (FD) adalah penurunan sumber daya daerah (aset bersih) yang signifikan, sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban atau belanjanya. Variabel ini diukur dengan nilai surplus/defisit-LO yang tersaji dalam laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember.

Legislature Size (LS) mencerminkan beban politik dalam penganggaran dan akuntabilitas di daerah, dimana semakin besar jumlah anggota legislatif, maka semakin besar pula kepentingan konstituen yang harus diperjuangkan untuk diakomodasi dalam APBD (Abdullah, 2012). Variabel ini diukur dengan jumlah anggota DPRD.

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$, dengan Y adalah Manipulasi Akrual, a adalah Konstanta, X_1 adalah *Government Size (GS)*, X_2 adalah Kapasitas Fiskal (KF), X_3 adalah *Fiscal Distress (FD)*, X_4 adalah *Legislature Size (LS)*, b_1 - b_4 adalah koefisien regresi dan e adalah *error terms*.

No.	Uraian	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maksimum
1	Manipulasi akrua (Y)	0,40677485	0,110941309	0,048770994	282 0,844554232
2	Government size (X1)	2.425.710.216.000	1.009.606.237.000	1.064.650.371.186	5.981.471.416.543
3	Kapasitas fiskal (X2)	0,57256	0,320075	0,029	1,817
4	Fiscal distress (X3)	-3.367.864.099	57.170.173.050	-342.376.868.422	377.392.128.094
5	Legislature size (X4)	28,26	7,195	20	45

Sumber: Data penelitian, 2021 (diolah)

Nilai rata-rata (*mean*) manipulasi akrua yang terjadi di Aceh selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 0,41%. Artinya, secara rata-rata, praktik diskresi akrua Pemda di Aceh cukup rendah. Nilai manipulasi akrua tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,84% pada Kab. Aceh Singkil dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,05% pada Kab. Aceh Jaya.

Nilai rata-rata kenaikan *government size* tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp2,425 triliun. Total aset tertinggi ada di tahun 2017 sebesar Rp5,981 triliun di Kota Banda Aceh dan nilai terendah pada tahun 2016 sebesar Rp1,064 triliun di Kota Subulussalam.

Nilai rata-rata kapasitas fiskal pada Pemda di Aceh selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 0,573. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kapasitas fiskal pada Pemda rata-rata pada kategori rendah, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 1,817 yaitu pada Kab. Aceh Utara dan terendah sebesar 0,029 pada Kab. Aceh Selatan.

Nilai rata-rata *fiscal distress* tahun 2016-2020 sebesar minus Rp3.367 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat surplus/defisit yang berbeda-beda pada kabupaten/kota setiap tahunnya. Besaran realisasi surplus LO Pemda tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp377,392 miliar (Kab. Pidie Jaya) dan surplus terendah pada tahun 2020 sebesar Rp235,542 juta. Besaran realisasi defisit Pemda tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar minus Rp342.376 miliar di Kab. Pidie Jaya, sedangkan terendah sebesar minus Rp 878,291 juta yaitu di Kab. Bener Meriah.

Nilai rata-rata *legislature size* selama tahun 2016-2020 sebesar 28,26 atau rata-rata jumlah anggota DPRD adalah 28 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah anggota DPRK yang berbeda-beda, sesuai dengan jumlah penduduk dan pembagian wilayah pemilihannya. Jumlah anggota DPRK tertinggi sebesar 45 orang yaitu di Kab. Aceh Utara dan terendah sebanyak 20 orang pada Kab. Aceh Jaya, Kab. Gayo Lues, Kota Sabang, Kab. Simeulue dan Kota Subulussalam.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel berikut:

Y = 0,188 – 1,009E-13GS – 0,003KF – 4,055E-13FD + 0,013LS + e				
<i>t-value</i>	-8,040	-0,128	-3,868	7,523
<i>Sig. value</i>	0,000*	0,898	0,000*	0,000*
<i>F-value/Sig. value</i>	24,598/0,000			
<i>R/R²/Adj. R²</i>	0,689/0,474/0,455			

Catatan: *signifikan pada $\alpha=5\%$.

Sumber: Data Penelitian (2021).

Tabel 2 menyajikan nilai F yang diperoleh sebesar 24,598 dengan nilai *sig.* sebesar 0,000, lebih kecil dari $\alpha=5\%$ ($0,000 < 0,05$). Hasil uji F ini menunjukkan bahwa variabel independen (*government size*, kapasitas fiskal, *fiscal distress*, dan *legislature size*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap manipulasi akrual. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,474 bermakna bahwa variasi pada keempat variabel independen tersebut menjelaskan sebesar 47,4 persen variasi dalam manipulasi akrual pada laporan keuangan Pemda di provinsi Aceh tahun 2016-2020. Sisanya sebesar 52,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Pengaruh Government Size terhadap Manipulasi Akrual

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi variabel *government size* (GS) terhadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa secara statistik variabel GS berpengaruh negatif (signifikan) terhadap variabel manipulasi akrual. Artinya, semakin besar suatu Pemda maka kecenderungan Pemda di Aceh untuk melakukan manipulasi akrual semakin rendah atau besaran manipulasi akrual lebih kecil. Dengan demikian, hipotesis alternatif pertama yang menyatakan *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual tidak ditolak.

Pemda yang lebih besar memiliki beban tugas yang lebih kompleks karena semakin penduduk yang dilayani dan aset yang dikelola juga lebih besar. Biasanya, kebijakan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah mendapat perhatian lebih besar dari Pusat, dan masyarakat, serta secara politik mendapat pengawasan lebih cermat dari legislatif. Handayani & Rachadi (2009) dan Purnama (2017) menemukan bahwa perusahaan sedang dan besar tidak terbukti lebih agresif dalam melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif, baik untuk menghindari *losses* maupun *earnings decreases*. Semakin besar perusahaan akan cenderung untuk menurunkan praktik manajemen laba, karena perusahaan besar secara politis lebih mendapat perhatian dari institusi pemerintahan, terutama untuk masalah pajak dan praktik monopoli.

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Manipulasi Akrual

Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi variabel Kapasitas Fiskal (KF) terhadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa secara statistik variabel KF tidak berpengaruh terhadap variabel manipulasi akrual. Nilai negatif pada koefisien regresi menunjukkan adanya arah hubungan berlawanan dengan variabel manipulasi akrual, dimana semakin tinggi kapasitas fiskal maka manipulasi akrual akan semakin rendah. Namun, hubungan ini dapat diabaikan karena secara statistik tidak bermakna.

Kapasitas fiskal sebagai ukuran kemampuan suatu daerah untuk membiayai pelayanan publik (Nagowski, 2007) selalu menjadi pertimbangan dalam penganggaran Pemda yang cenderung oportunistik (Abdullah, 2004; 2012; Halim & Abdullah, 2006) dan ditetapkan dengan pendekatan politik (Donatella, 2019; Abdullah, 2012). Akibatnya, dalam anggaran tersimpan *budget slack* dan dalam pelaporan keuangan akan terjadi *variance* (selisih anggaran dan realisasinya). Kapasitas fiskal daerah tidak lepas dari peran pemerintah pusat melalui dana transfer sebagai bentuk upaya untuk pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Pemerataan kapasitas fiskal sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan standar pelayanan yang sama tanpa memaksakan beban kepada publik (Petchey, 2011). Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya pengaruh KF terhadap MA.

Pengaruh Fiscal Distress terhadap Manipulasi Akrua

Hasil olah data yang menguji pengaruh variabel *fiscal distress* (FD) terhadap manipulasi akrua menunjukkan bahwa *fiscal distress* berpengaruh negatif (signifikan) terhadap manipulasi akrua. Artinya, semakin besar *fiscal distress* maka Pemda memiliki diskresi akrua semakin rendah. Dengan demikian, hipotesis alternatif ketiga yang menyatakan *fiscal distress* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrua tidak dapat ditolak.

Studi Riadiani & Wahyudin (2015) membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap akrua diskresioner, sedangkan hasil studi Nugroho & Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat tingkat agresivitas pajak perusahaan. Di sisi lain, PAD dan pendapatan transfer terbukti mampu mengurangi *fiscal distress* pada pemerintah daerah (Ansori, et al., 2021). Ini memberikan dukungan empiris bagi eksekutif dan legislatif untuk membuat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan penerimaan baik di tingkat pusat dan daerah. Temuan tersebut mencakup informasi penting untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi *fiscal distress* di semua Pemda di Indonesia.

Pengaruh Legislature Size terhadap Manipulasi Akrua

Hasil regresi variabel *legislature size* (LS) terhadap MA menunjukkan bahwa *legislature size* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrua. Maknanya, semakin besar *legislature size* maka manipulasi akrua akan semakin tinggi. Jumlah anggota dewan yang lebih besar akan memperbesar manipulasi akrua dalam pelaporan keuangan Pemda di Provinsi Aceh tahun 2016-2020.

Legislature size mencerminkan besaran kepentingan politik di Pemda yang berasal dari legislatif (DPRD). Setiap anggota DPRD memiliki kepentingan dalam menentukan prioritas dan alokasi sumberdaya dalam anggaran daerah dan hal ini dapat diakomodir melalui pengalokasian untuk dana aspirasi dewan (*pork-barrel*), yang sekarang disebut pokok-pokok pikiran DPRD. Dana aspirasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konstituennya. Semakin banyak anggota DPRD maka akan semakin besar pula konstituen yang diwakili, sehingga semakin luas cakupan informasi dalam LKPD, yang akan dicermati oleh legislatif. Menurut Donatella (2019), subjektivitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrua dapat bermasalah karena memberi kesempatan kepada politisi terpilih untuk memanipulasi informasi yang disampaikan kepada *voters* dan *stakeholder* lain. Temuan ini berbeda dengan temuan Petterson-Lidbom (2012) yang menyatakan bahwa LS dapat mengontrol lebih baik perilaku birokrat yang *budget maximizing*. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis lebih jauh kaitan ukuran legislatif dengan kebijakan akrua Pemda.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh

government size, fiscal distress dan legislature size terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda di Provinsi Aceh tahun 2015-2019 dapat disimpulkan bahwa: government size dan fiscal distress berpengaruh negatif dan legislature size berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda, sedangkan kapasitas fiskal tidak berpengaruh.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data keuangan Pemda kabupaten/kota di Aceh untuk lima tahun (2015-2019), sehingga tidak sepenuhnya bisa digeneralisir untuk kasus di provinsi lain. Meskipun secara umum tidak terdapat perbedaan standar dalam pelaporan keuangan Pemda, kekhususan Aceh sebagai daerah otonom khusus (Otsus) yang juga menerapkan Syariat Islam dan mendapatkan dana Otsus membuat kebijakan APBD menjadi berbeda dengan Pemda lain yang tidak berstatus Otsus. Studi lanjutan perlu memasukkan Pemda kabupaten dan kota lain yang tidak menerapkan Otsus, terutama untuk perbandingan dan menganalisis perbedaan dalam praktik manipulasi akrual.

Kedua, satu variabel independen nonkeuangan yang digunakan, yaitu legislature size, yang mencerminkan adanya aspek politik dalam penyelenggaraan akuntabilitas Pemda di Aceh, belum “diukur” dengan menggunakan indikator yang tepat. Artinya, perilaku oportunistik dalam penganggaran (Abdullah, 2012) perlu dianalisis lebih jauh apakah terkait dengan perilaku dalam menghadapi fenomena manipulatif yang dilakukan oleh eksekutif (Pemda) dalam pelaporan keuangan, khususnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda di LO. Sebab, dalam praktiknya tidak selalu kualitas penganggaran di legislatif yang besar lebih baik daripada legislatif yang kecil.

Terakhir, sebagai implikasi dari limitasi pertama dan kedua, rendahnya nilai koefisien determinasi (hanya sebesar 47,40 persen). Hal ini menunjukkan adanya variabel lain yang perlu dimasukkan dalam model penelitian ini, sehingga dapat meningkatkan “ketercakupan prediktor”. Beberapa variabel lain yang dapat direkomendasikan sebagai prediktor untuk manipulasi akrual adalah, pertama, besaran sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang dapat digunakan pada tahun anggaran berkenaan. Jika jumlah SiLPA relatif besar, terutama dalam porsi terhadap total penerimaan daerah, maka manipulasi akrual dapat diprediksi akan lebih kecil. Kedua, siklus politik atau pemilihan umum dan status petahana (incumbent) calon kepala daerah berikutnya. Kepada daerah yang sedang menjabat dan ingin mencalonkan diri kembali cenderung akan memanipulasi LKPD untuk menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik akan membangun citra bahwa kepala daerah yang sedang berkuasa (incumbent) memiliki kapasitas memimpin dan secara objektif akan dinilai berhasil mengelola keuangan daerah. Ketiga, kualitas audit. Banyak penelitian di bisnis yang membuktikan bahwa tingkatan earnings management yang dilakukan manajemen dipengaruhi oleh kualitas audit. Chi, et al. (2011) dan Donatella, et al. (2018) menemukan bahwa audit membatasi manajemen dalam mengatur labanya. Artinya, audit eksternal atas LKPD dapat mempengaruhi besaran manipulasi akrual jika auditor mencermati lebih jauh kebijakan akuntansi akun-akun neraca dan LO. Keempat, internal audit. Prawitt, et al. (2009) menemukan bahwa audit internal memoderasi besaran manipulasi akrual pada perusahaan. Inspektorat daerah sebagai internal auditor terlibat dalam pelaporan keuangan dengan melakukan reviu atas LKPD yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebelum diserahkan kepada BPK RI selaku auditor eksternal. Terakhir, kelima, menggunakan specific accruals untuk mencermati bentuk manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh Pemda, seperti yang dipakai oleh Marquardt & Wiedman (2004).

REFERENCES

- Abdullah, S. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang, 23-26 Oktober.
- Abdullah, S. 2012. Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Abdullah, S., dan A. Junita. 2020. Memahami hubungan anggaran dan pelaporan keuangan daerah, dalam buku *Isu Kontemporer Publik (Edisi 1) Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik*. Surabaya: Unitomo Press, 55-63.
- Abdullah, S., D. Darwanis, E. Gunawan, dan S.S. Karo-Karo. 2020. Akuntabilitas anggaran bencana pada pemerintah daerah. *Book Series Perkembangan Kontemporer Akuntansi di Indonesia: Dinamika Akuntansi di Masa Krisis*, 1–13. Banda Aceh: Unsyiah Press.
- Abdullah, S., M.K. Reza, A. Junita, dan T. Meutia. 2020. Parliament oversight on local government financial management: An empirical evidence. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 5(3): DOI: [10.23917/reaksi.v5i3.11687](https://doi.org/10.23917/reaksi.v5i3.11687).
- Abdullah, S., M. Saputra, D. Fazella, H. Hasnawati, dan A. Afridzal. 2019. Determinan kinerja anggaran belanja pendidikan pada kabupaten/kota di Aceh. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 19(2): 149-166. DOI: <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.3253>.
- Afiqoh, N.W. 2020. Application Of Accrual-Based Government Accounting Standards and Obtaining Fair Opinions Without Exceptions. *Jurnal Akademi Akuntansi* 3(2): 244-259. DOI: <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.12925>.
- Anessi-Pessina, E. dan M. Sicilia. 2020. Do top managers' individual characteristics affect accounting manipulation in the public sector? *Journal of Public Administration Research and Theory* 30(3): 465-484. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz038>.
- Anessi-Pessina, E. dan M. Sicilia. 2015. Biased budgeting in the public sector: Evidence from italian local governments. *Local Government Studies* 41(6): 819-840. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1012194>.
- Ansori, A., N. Nasir, Y. Diantimala, dan S. Abdullah. 2020. The role of revenues in reducing local government fiscal distress: An empirical study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economic and Business* 8(6): 0597-0607. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0597>.
- Arcas, M.J. dan C. Martí. 2016. Financial performance adjustment in English local governments. *Australian Accounting Review* 26(2): 141–152. <https://doi.org/10.1111/auar.12094>.
- Arnaboldi, M. dan I. Lapsley. 2009. On the implementation of accrual accounting: A Study of conflict and ambiguity. *European Accounting Review* 18(4): 809-836. <https://doi.org/10.1080/09638180903136225>.
- Arzaghi, M. dan J.V. Henderson. 2005. Why countries are fiscally decentralizing. *Journal of Public Economics* 89(7): 1157–1189. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.10.009>.
- Aziz, A. 2016. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. *Eksis* 11(1): 86-101. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.
- Baskaran, T. dan A. Bigsten. 2013. Fiscal capacity and the quality of government in sub-

saharan Africa. *World Development* 45: 92-107.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.09.018>.

287

Beck, A.W. 2018. Opportunistic financial reporting around municipal bond issues, *Review of Accounting Studies*, 23(3): 785-826. <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9454-2>.

Beckett-Camarata, J. 2009. Local government measurement and use of performance accounting and financial reporting data in planning and budgeting decision support: A multicase study. *Public Performance & Management Review* 33(2): 255-265. DOI: [10.2753/PMR1530-9576330205](https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576330205)

Bisogno, M. dan P. Donatella. 2021. Earnings management in public-sector organizations: a structured literature review, *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(6): . <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035>.

Blom-Hansen, J., K. Houlberg, dan S. Serritzlew. 2021. Jurisdiction size and local government effectiveness: Assessing the effects of municipal amalgamations on performance. *European Journal of Political Research* 60(1): 153-174. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12394>.

Carlin, T.M. 2005. Debating the impact of accrual accounting and reporting in the public sector. *Financial Accountability & Management* 21(3): 309-336.

Chi, W., L.L. Lisic, dan M. Pevzner. 2011. Is Enhanced Audit Quality Associated with Greater Real Earnings Management? *Accounting Horizons* 25(2): 315-335. DOI: [10.2308/acch-10025](https://doi.org/10.2308/acch-10025).

Cohen, S., M. Bisogno, dan I. Malkogianni. 2019. Earnings management in local governments: The role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(3), 331-348. <https://doi.org/10.1108/JAAR-10-2018-0162>.

Connelly, B.L., S.T. Certo, R.D. Ireland, dan C.R. Reutzel. 2011. Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management* 37(1): 39-67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>.

Damanpour, F. 1991. Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. *Academy of Management Journal* 34: 555-90. <https://doi.org/10.5465/256406>.

Dechow, P.M., R.G. Sloan, dan A.P. Sweeney. 1995. Detecting earnings management. *The Accounting Review* 70(2): 193-225. <https://www.jstor.org/stable/248303>.

Donatella, P. 2019. Is political competition a driver of financial performance adjustments? An examination of Swedish municipalities. *Public Money and Management* 40(2): 122-130. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1667684>.

Donatella, P. dan T. Tagesson. 2020. CFO characteristics and opportunistic accounting choice in public sector organizations. *Journal of Management and Governance* 25(2): 509-534. <https://doi.org/10.1007/s10997-020-09521-1>.

Donatella, P., M. Haraldsson, dan T. Tagesson. 2019. Do audit firm and audit costs/fees influence earnings management in Swedish municipalities? *International Review of Administrative Sciences* 85(4): 673-691. <https://doi.org/10.1177/0020852317748730>.

Fatmawati, R. dan D. Setiawan. 2018. Dampak Pengendalian intern dan ketepatan informasi terhadap kebermanfaatan akuntansi akrual: Studi pada pemerintah daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5(2): 137-150. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.10900>.

- Ferreira, A., J. Carvalho, dan F. Pinho. 2020. Political competition as a motivation for earnings management close to zero: the case of Portuguese municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(3): 461-485. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0109>.
- Gamayuni, R.R., N. Nurdiono, F. Dharma, dan J. Prasetyo. 2021. *Motivation and abnormal accrual characteristics on financial statements of local governments in Indonesia. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. (Unpublished)*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/35887/>.
- Hafizah, N., N.W.T. Respati, dan C. Chairina. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Triangle. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 6(1): 811-822. DOI: <https://doi.org/10.22219/jrak.v6i1.5077>.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2(1): 53-64.
- Handayani, S.R. dan A.D Rachadi. 2009. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 11(1): 33-56. <https://doi.org/10.1143/PTP.105.537>.
- Hardiningsih, P., I. Januarti, C. Srimindarti, dan R.M. Oktaviani. 2019. Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements? *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 23(2): 106-116. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5>.
- Jansen, E.P. 2008. New public management: Perspectives on performance and the use of performance information. *Financial Accountability & Management*, 24(2): 169-191. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00447.x>.
- Junita, A., E. Erlina, E. Abubakar, dan S. Abdullah. 2018. The effect of budget variances on the local government budget changes with legislature size as moderator. *Academic Journal of Economic Studies* 4(1): 162-173.
- Kalbuana, N., B. Prasetyo, P. Asih, Y. Arnas, S.L. Simbolon, A. Abdusshomad, B. Kurnianto, R. Rudy, K. Kardi, R. Saputro, Y. Yohana, M.P. Sari, R.A.P. Zandra, D.A. Pramitasari, R. Rusdiyanto, G. Gazali, I.A.J. Putri, M. Nazaruddin, M.R. Naim, dan F.M. Mahdi. 2021. Earnings management is affected by firmsize, leverage and ROA: Evidence from Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal* 20 (Special Issue 2): 1-12.
- Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1(1): 27-35. <https://doi.org/10.15294/aa.v1i1.453>.
- Lapsley, I., R. Mussari, dan G. Paulsson. 2009. On the adoption of accrual accounting in the public sector: A self-evident and problematic reform. *European Accounting Review* 18(4): 719-723. <http://dx.doi.org/10.1080/09638180903334960>.
- Lewis, B.D. 2003. Local government borrowing and repayment in Indonesia: does fiscal capacity matter? *World Development* 31(6): 1047-1063. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00047-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00047-0).
- Maher, C.S., J.W. Oh, dan W-J. Liao. 2020. Assessing fiscal distress in small county governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(4): 691-711. DOI 10.1108/JPBAFM-02-2020-0016.

- Marquardt, C.A. dan C.I. Wiedman. 2004. How are earnings managed? An examination of specific accruals. *Contemporary Accounting Research* 21(2): 461-499. <https://doi.org/10.1506/G4YR-43K8-LGG2-F0XK>.
- Martinez-Vazquez, J. dan J.L.F. Boex. 1997. Fiscal capacity: An overview of concepts and measurement issues and their applicability in the Russian federation. *SSRN Electronic Journal* 97(3). <https://doi.org/10.2139/ssrn.470821>.
- Nagowski, M.P. 2007. The fiscal capacity of New England. *New England Public Policy Center, Policy Brief* (07-4). <http://www.bostonfed.org/economic/neppc/briefs/2007/briefs074.pdf>.
- Nugroho, S.A. dan A. Firmansyah. 2017. Pengaruh financial distress, real earnings management dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Journal of Applied Business Administration* 1(2): 163-182. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Petterson-Lidbom, P. 2011. Does the size of the legislature affect the size of government? Evidence from two natural experiments. *Journal of Public Economics* 96(3-4): 269-278. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.07.004>.
- Pilcher, R. 2011. Local governmental management of discretionary and specific accruals. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation* 7(1-2): 32-60. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2011.037725>.
- Pina, V., M.J. Arcas, dan C. Martí. 2012. Accruals and 'accounting numbers management' in UK executive agencies. *Public Money & Management* (May): 273-280. <http://dx.doi.org/10.1080/09540962.2012.691306>.
- Purnama, D. 2017. Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 3(1): 1-14.
- Prawitt, D.F., J.L.Smith, dan D.A. Wood. 2009. Internal audit quality and earnings management. *The Accounting Review* 84(4): 1255-1280.
- Ram'dhan, M., N. Nur, N. Nurdiono, E. Evana, F.D. Gustiawaty, dan L. Lindrianasari. 2021. Implementation of accrual accounting concept in Indonesian government: Is it the true concept? *International Journal of Trade and Global Market* 14(2): 166-175.
- Riadiani, A.R. dan A. Wahyudin. 2015. Pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba dengan financial distress sebagai intervening. *Accounting Analysis Journal* 4(3): 1-9.
- Ricciuti, R. 2004. Legislatures and government spending: Evidence from democratic countries. *International Centre For Economic Research (ICER) Working Paper Series* 20. <https://ideas.repec.org/p/icr/wpicer/20-2004.html>.
- Richardson, V.J. 2000. Information asymmetry and earnings management: Some evidence. *Review of Quantitative Finance and Accounting* 15(4): 325-347. <https://doi.org/10.1023/A:1012098407706>.
- Rivenbark, W.C. dan D.J. Roenigk. 2011. Implementation of financial condition analysis in local government. *Public Administration Quarterly* 35(2): 241-267. <https://www.jstor.org/stable/41506755>.
- Rohman, A. 2016. Analisis kebijakan diskresi akrual terhadap sisa lebih (kurang) perhitungan

anggaran. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* 10(1): 1-24. <https://core.ac.uk/download/pdf/267824030.pdf>

- Rohman, A., R. Daud, dan U. Ubaidillah. 2018. Analisis pengaruh laporan hasil pemeriksaan, diskresi akrual dan tingkatan akrual terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* 11(3): 486-512. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.009>.
- Rohman, A., R. Daud, dan U. Ubaidillah. 2019. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* 12(1): 29-50. <https://doi.org/10.22441/profita.2019>.
- Sari, I.P. 2016. Pengaruh ukuran pemerintahan daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi pada kabupaten/kota pulau Sumatera. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3(1): 679-692.
- Sari, N.M.D.P. dan I.K. Mustanda. 2019. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen* 8(8): 4759–4787. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02>.
- Schipper, K. 1989. Commentary on earnings management. *Accounting Horizons* 3(4): 91-102.
- Siregar, S.V. dan S. Utama. 2008. Type of earnings management and the effect of ownership structure, firm size, and corporate-governance practices: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting* 43(1): 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.01.001>.
- Sopamena, G.C., M.P. Kambuaya, dan R.S. Arunglamba. 2020. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah: Studi pada kabupaten Keerom. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset* 3(1): 41-51.
- Stapenhurst, F., A. Staddon, R. Draman, dan L. Imbeau. 2018. Parliamentary oversight and corruption in the Caribbean: comparing Trinidad & Tobago and Grenada, *Commonwealth & Comparative Politics* (Special Issue): 1-30. DOI: <https://doi.org/10.1080/14662043.2018.1444933>.
- Sugiri, S. dan S. Abdullah. 2003. Pengaruh free cash flow, set kesempatan investasi, dan leverage finansial terhadap manajemen laba. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiyaha Yogyakarta* 28: 11-20.
- Surya, B.C. 2016. Pengaruh kapasitas fiskal dan restrukturisasi pinjaman terhadap kinerja pembayaran pinjaman pemerintah daerah. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 1(3): 69-83.
- Steccolini, I. 2004. Is the annual report an accountability medium? An empirical investigation into Italian local governments. *Financial Accountability & Management* 20(3): 0267-4424.
- Trussel, J.M. dan J.S. Greenlee. 2004. A financial rating system for charitable nonprofit organizations. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting* 11: 93-116. [https://doi.org/10.1016/s0884-0741\(04\)11005-7](https://doi.org/10.1016/s0884-0741(04)11005-7)
- Trussel, J.M. dan P.A. Patrick. 2009. A predictive model of fiscal distress in local governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 21(4): 578-616. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-21-04-2009-b004>

- Trussel, J.M. dan P.A. Patrick. 2012. A survival analysis of U.S. municipalities in fiscal distress. *International Journal of Public Administration* 35(9): 620-633. <https://doi.org/10.1080/01900692.2012.661189>.
- Vinnari, E.M. dan S. Näsi. 2008. Creative accrual accounting in the public sector: 'Milking' water utilities to balance municipal budgets and accounts. *Financial Accountability and Management* 24(2): 97-116. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2008.00448.x>
- Zeedan, R., E. Vigoda-Gadot, dan Y. Ben-Artzi. 2014. Causes of (and solutions for?) financial crises in local governments: Insights from local arab authorities in Israel. *Administration and Society*: 1-19. <https://doi.org/10.1177/0095399714556501>.